

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat, menunjang kemajuan ekonomi yang lebih canggih pula. Saat ini informasi sangat begitu mudah diakses, dibagikan dan diterima oleh masyarakat. Hal ini membuat transaksi dalam hal barang dan jasa juga semakin mudah, memperluas ruang lingkup transaksi tersebut dengan adanya perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan Negara yang dipungut oleh Negara. Transaksi jasa dalam hal ini yaitu transportasi melalui aplikasi *online* yang saat ini menjadi salah satu alternatif transportasi yang sangat digemari oleh masyarakat, merupakan sumber potensi penerimaan yang sangat besar. Peraturan mengenai pemungutan pajak pengemudi angkutan *online* yang masih kurang jelas menimbulkan pertanyaan mengenai terpenuhinya asas kepastian hukum karena akan berdampak terhadap pengemudi yang bertransaksi di bidang jasa, Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif sedangkan Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep melalui teori-teori hukum dari para sarjana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian bahwa pengemudi angkutan melalui aplikasi *online* merupakan subjek pajak penghasilan jenis pajak yang dibayarkan yaitu Pajak Penghasilan dalam hal ini yaitu PPh 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan pemungutannya yang berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per:-16/PJ/2016. Pemungutan pajak menggunakan sistem pemotongan dari perusahaan Mitra Kerja melalui sistem *Self Assessment* dimana wajib pajak sendiri yang menilai dan menghitung secara mandiri kewajiban perpajakannya. Pemungutan pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat memaksa oleh Negara yang dijalankan oleh pemerintah kepada wajib pajak yaitu masyarakat. Pemungutan Pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pajak manakala harus mengacu pada peraturan perundang-undangan kiranya harus jelas sehingga subjek pajak yang menjadi wajib pajak dapat dengan jelas memahami hak dan kewajibannya. Hal ini untuk terciptanya dan terpenuhi asas-asas kepastian hukum dalam pemungutan pajak.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pajak Penghasilan, Pengemudi Angkutan *online*.

ABSTRACT

There is a rapid development of technologies nowadays, these development also supported economic sophisticated expansion. Nowadays information is easier to access, share and accepted by the people. This make goods and services transaction also easier, it is expanding the zone of transaction in today technology. Income Tax is one of source funding that is collected by the country. Services Transaction in this case that is online transportation by software application is become many of the people choices for transportation, so it is one of the most potential sources of funding for the country. The law that set for online transportation driver is still unclear, whether it is fulfilled the principle of law because it would impact the online driver itself because they are the subject of services transaction. The type of research used in this study is Normative Jurisdiction whilst the approach used by this study is using legal and theories that is been used by the law scholars. The result of this study is expected to give the idea that online driver is subject to Income Tax. The type of tax paid is Income tax article 21 of law Number 36 of 2008 about income tax or tax directorate general regulations Number PER:- 16/PJ/2016. The driver tax is collected by the system, in this case it is the work partner company that collected the tax and then the Work Partner Company will deposit the tax to the Government using the self assessment system where the taxpayers have the obligations to count themselves for their tax. Tax collection is a forceful act by the country that is run by the government. This is why tax collection must be based on the law and regulations, so it is become clear for the taxpayers their rights on obligations. This is to ensure the creation of good government and fulfillment of law principle of certainty.

Keywords: Law Certainty, Income Tax, Online Driver